

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2004: 423).

Menurut Sukirno (2006: 268) tingkat dan laju pertumbuhan suatu perekonomian ditentukan oleh empat faktor yaitu:

- (i) Luas tanah (termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya)
- (ii) Jumlah dan perkembangan penduduk
- (iii) Jumlah stok modal dan perkembangannya dari tahun ke tahun
- (iv) Tingkat teknologi dan perbaikannya dari tahun ke tahun

Luas tanah dan kekayaan dalam suatu negara adalah tetap. Oleh sebab itu, ia kurang diperhatikan dalam analisis teori-teori pertumbuhan, dan dianggap sebagai faktor penentu pembangunan yang tidak begitu penting. Dengan demikian, menurut teori-teori pertumbuhan, lajunya pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh perkembangan penduduk, perkembangan pananaman modal dan kemajuan teknologi.

Dari ke tiga faktor penting tersebut, faktor pertama yaitu perkembangan penduduk tidak selalu dipandang akan memberikan sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi. Teori Klasik menunjukkan bahwa kelebihan penduduk akan menyebabkan suatu masyarakat kembali ke taraf pembangunan yang sangat rendah. Penduduk dianggap memberikan sumbangan positif kepada pembangunan terutama karena, *pertama*, perkembangannya memperluas pasar; *kedua*, perbaikan

keterampilan dan mutunya dapat melahirkan berbagai pengaruh positif pada pembangunan; dan *ketiga*, penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam pembentukan modal.

Dua penentu pembangunan lainnya, yaitu pembentukan modal dan perbaikan teknologi, akan selalu memberikan sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi. Perbaikan teknologi dilakukan dengan mengadakan pembentukan modal. Maka kedua faktor ini sangat erat hubungannya satu sama lain. Berdasarkan kepada sifat hubungan di antara kedua faktor ini dapatlah dikatakan bahwa yang ideal bagi pembangunan ekonomi adalah pembentukan modal yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan teknologi atau yang disertai dengan perbaikan semacam itu (Sukirno, 2006: 269).

Untuk dapat mengukur tingkat pertumbuhan, dapat dilihat dari kinerja ekonomi suatu negara, yakni dengan mengestimasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selanjutnya bisa didekomposisikan menurut sektor untuk mendapatkan kontribusi sektoral terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB. Sementara estimasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode jangka panjang memperlihatkan besaran dan arah pertumbuhan ekonomi, komposisi sektoralnya memberi gambaran mengenai posisi relatif sektor-sektor berbeda di dalam ekonomi tersebut. Suatu analisis terhadap perubahan di dalam pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dari sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu memberikan ukuran perubahan struktural di dalam pola produksi dan jasa dalam ekonomi (Tambunan, 2008: 45).

B. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (pendekatan produksi).

Menurut Badan Pusat Statistik, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas dasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkut dan komunikasi, (8) keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

c. Pendekatan Pendapatan

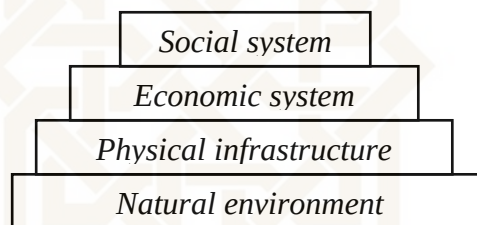
PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

C. Infrastruktur Listrik, Pendidikan, dan Kesehatan

Menurut Grigg (1988) dalam Robert J. Kodoatie (2003: 8) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi (Kodoatie, 2003: 9).



Gambar 2.1
Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan alam yang harmoni (Grigg, 1998)

Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama bagi penentu kebijakan.

Secara garis besar infrastruktur dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik (Sobarsa 2015: 127)

Infrastruktur fisik merujuk kepada yang lebih bersifat peralatan fisik antara lain dapat berupa:

- a. Jalan raya dan jalan kereta api
- b. Air bersih
- c. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut
- d. Saluran-saluran atau kanal-kanal
- e. Irigasi atau waduk
- f. Pengolahan limbah (limbah air maupun limbah sampah)
- g. Pembangkit energi listrik

Infrastruktur non fisik meliputi sarana dan prasarana yang dapat memperlancar kebutuhan dasar fisik pegorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk:

- a. Telekomunikasi
- b. Sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi
- c. Sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas
- d. Perangkat keamanan seperti angkatan bersenjata
- e. Perangkat hukum kepolisian, Kejaksaan, kehakiman
- f. Perangkat penelitian dan pengembangan
- g. Lembaga keuangan

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, Pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerja sama investasi, subsidi, garansi dan penghapusan pajak sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005. Kompensasi diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang lolos dalam penyaringan KKPPI (Komite dan Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur) dan Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan (KPRDK). Perpres No. 67 Tahun 2005 merupakan pengganti keputusan Presiden No. 7 Tahun 1989. Perpres baru ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan paradigma dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur, antara lain berupa penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (Posumah, 2015: 3).

1. Listrik

Listrik termasuk dalam salah satu infrastruktur fisik. Masalah lingkungan dan ekonomi merupakan alasan di balik dorongan yang cepat akan pemanfaatan energi terbarukan di seluruh dunia. Selain untuk mengatasi hambatan secara ekonomi dan komersial, pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan tujuan atau *goal* yang ditetapkan oleh sebagian negara yang ingin memaksimalkan potensi energi terbarukan di wilayahnya dengan biaya murah. Energi listrik merupakan salah satu energi primer yang tidak dapat dilepaskan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, baik disektor rumah tangga, instansi pemerintah maupun industri. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya penggunaan peralatan dan pelanggan yang menggunakan listrik mengakibatkan kebutuhan energi listrik meningkat pesat (Juwito, dkk, 2012: 22).

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang harus terus ditingkatkan karena mengingat keberhasilan pembangunan yang sedang akan dan terus dilakukan tidak lepas dari pengaruh kualitas sumberdaya manusia, baik itu di dalam tubuh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Keberadaan pembangunan prasarana pendidikan pada dasarnya bertujuan mengupayakan agar peserta didik di suatu wilayah mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Secara sederhana menurut teori Lineberry bahwa proses implementasi meliputi semua tindakan antara pernyataan (formulasi) kebijakan dan dampak aktualnya. Proses implementasi tersebut memiliki elemen untuk menetapkan tanggungjawab implementasi, menjabarkan tujuan, mengkoordinasikan sumberdaya serta pengalokasian sumberdaya guna kesempurnaan dampak atau untuk mencapai tujuan (Herman, dkk, 2014: 2287).

Salah satu dari pokok-pokok kebijakan untuk membangun pendidikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) yaitu pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi serta disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian disegala bidang, serta prasarana dan sarana pendidikan terus disempurnakan, ditingkatkan, dan lebih didayagunakan (Mulyana, 2011: 113).

3. Kesehatan

Pembangunan prasarana kesehatan mempunyai posisi penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif, sebab dengan prasarana kesehatan yang memadai niscaya kesehatan para penyelenggara negara/pemerintah dan masyarakat akan lebih terjamin. Maka dari itu sudah selayaknya jika mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah agar tingkat derajat kesehatan masyarakat dan penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif. Bagaimanapun pembangunan prasarana kesehatan sangat urgen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (Herman, dkk, 2014: 2286).

Kesehatan adalah salah satu faktor utama bagi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan SDM yang sehat merupakan modal pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat agar tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang no. 36 tahun 2009

tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, juga merupakan suatu investasi (Profil Statistik Kesehatan, 2015: 215).

Dalam pembangunan Sektor Kesehatan Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 telah ditetapkan arah dan kebijakan, yakni: dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu terus ditingkatkan mutu pelayanan Rumah-rumah Sakit, lembaga-lembaga pemulihan kesehatan, pusat-pusat kesehatan masyarakat serta lembaga-lembaga kesehatan lainnya, dan perlu ditingkatkan pula penyediaan dan pemerataan tenaga medis, paramedis, dan tenaga kerja lainnya; pelaksanaan pelayanan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, harus selalu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan disertai dengan pengembangan cara pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sendiri berdasarkan prinsip asuransi (Mulyana, 2011: 140).

D. Hubungan Infrastruktur Listrik, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Salah satunya adalah listrik yang perlu dikembangkan. Dalam hal ini listrik sangat diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Akan tetapi, disebabkan sifat dari jasa tersebut merupakan “barang publik” (*public goods*) dan sukar untuk memungut pembayarannya. Atau, apabila pembayaran dapat dikutip, modal yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur tersebut sangat besar dan tidak ekonomis apabila dikembangkan oleh pihak swasta. Dengan demikian pengembangan infrastruktur untuk menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah (Sukirno, 2004: 442).

Peran infrastruktur baik itu infrastruktur listrik, pendidikan, ataupun kesehatan penting guna menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dengan daerah penyangganya. Di daerah-daerah terpencil yang sulit dijagkau, biasanya

penduduknya hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari gerak maju pembangunan di pusat pertumbuhan terdekat sekalipun. Dengan kendala kondisi geografis yang sedemikian itu, kaum petani di daerah-daerah terpencil sulit memasarkan hasil pertaniannya. Kalaupun bisa, kaum petani yang penghasilannya tidak seberapa tersebut harus membayar dengan biaya yang mahal. Kendala tersebut menghalangi kaum miskin untuk ikut dalam proses pembangunan, baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan produktivitas kerjanya. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Atmaja, Mahalli, 2013: 253).

Selain itu, Todaro (2006: 434) menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan yang mendasar yakni ada pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

E. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Secara Umum Mengenai Infrastruktur dalam Perspektif Islam

Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi (1991) sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Abidin (2012: 364) keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi yang seimbang antara duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah

(kepuasan non-materi) itulah Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena menurut Islam, keadaan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut. Suatu lingkungan sosial yang didalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban. Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari segi pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Dilansir dari artikel voa-islam.com tentang pengaturan pembangunan infrastruktur dalam Islam yang ditulis oleh Yane Agustina, ada empat poin penting dalam pembangunan infrastruktur publik dalam Islam, yakni:

1. Dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah tanggungjawab negara, bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan pola pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalistik yang menjadikan proyek infrastruktur sebagai ajang mencari keuntungan (lihat proyek jalan tol yang senantiasa berbayar) atau arena untuk kepentingan politik semata.
2. Sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah membahas secara rinci dan tuntas masalah kepemilikan (*milkiyyah*), pengelolaan kepemilikan (*tasharruf*), termasuk distribusi barang dan jasa ditengah-tengah masyarakat (*tauzi'*) juga memastikan berjalannya politik ekonomi (*siyasah iqtishadiyyah*) dengan benar. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup

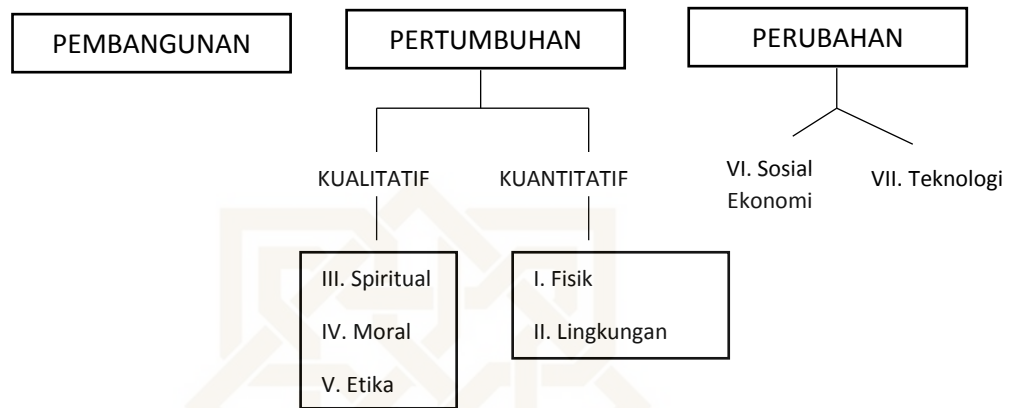
untuk membiayai penyelenggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga. Dengan begitu, ketika negara mengalami situasi dimana harus membangun infrastrukturnya, maka negara mempunyai banyak pilihan sumber dana karena masalah penyelenggaraan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah selesai.

3. Rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.
4. Pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana *Baitul Mal*, tanpa memungut sepeserpun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara.

Kegagalan pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di dunia saat ini diakibatkan oleh pandangan yang terpisah antara ekonomi dan agama. Pembangunan ekonomi seolah-olah tujuan utama dari kehidupan manusia yang ditandai dengan ukuran-ukuran ekonomi seperti pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan tanpa diikuti prinsip-prinsip religius maka dalam jangka panjang hanya akan membawa bencana besar bagi umat manusia dimuka bumi ini (Masriah, 2011: 150).

Menurut Kuncoro (2010: 24) sebagaimana pada gambar 7 di bawah, menunjukkan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin terjadinya perubahan, baik perubahan teknologi maupun sosial-ekonomi. Pertumbuhan yang merupakan indikator utama pembangunan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif. Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam Islam. Oleh karena itu, faktor etika, moral, dan spritual yang merupakan faktor pembentuk aspek kualitatif sangat menentukan kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Kualitas pertumbuhan yang baik tersebut pada gilirannya akan

menentukan bentuk perubahan yang terjadi, yang akhirnya mempengaruhi kualitas proses pembangunan secara keseluruhan.



Gambar 2.2
Konsep Pembangunan

SUMBER MANIFESTASI:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Takut akan Tuhan | IV & V. Pertumbuhan Sosial-Ekonomi |
| II & III. Nilai Pola Islam | VI & VII. Usaha Sendiri |

F. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Penelitian itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal ilmiah yang telah diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang ada di dalam negeri.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini yakni berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Desty Nurhidayanti Chaerunnisa yang berjudul “*Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sukabumi: Periode Tahun 1990-2012*”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa infrastruktur kesehatan memberikan pengaruh positif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi, berbeda halnya dengan infrastruktur sekolah yang memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi.

Penelitian terdahulu selanjutnya yakni pada skripsi yang ditulis oleh Agung Budi Luhur Wibowo yang berjudul “*Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan*

Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2006-2013)”. Hasil dari penelitian ini yakni infrastruktur listrik, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penelitian terdahulu berikutnya diambil dari jurnal dan ditulis oleh Lise Pranessy, Ridwan Nurazi, dan Merri Anitasari yang berjudul “*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa energi listrik terjual, jumlah sekolah, dan jumlah puskesmas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa aspek dari perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya yakni pada tempat, waktu, dan objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah pelanggan listrik, jumlah sekolah, dan jumlah puskesmas. Penelitian ini meneliti pada kota dan kabupaten di Provinsi Lampung periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Sedangkan persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah banyaknya penelitian yang menggunakan variabel yang sama yakni jumlah pelanggan listrik, jumlah sekolah, jumlah puskesmas, dan pertumbuhan ekonomi, dan juga banyak ditemukan kesamaan dalam penggunaan alat analisis.

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1.	Desty Nurhiday anti Chaerunn isa (2014)	Skripsi Jurusan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2014	Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sukabumi: Periode Tahun 1990-2012	Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi, infrastruktur jalan, air bersih, listrik, rumah sakit dan pendidikan. Metode nya yakni Ordinary Least Square (OLS).	1. Infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi. 2. Infrastruktur jalan dan sekolah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi. 3. Sedangkan infrastruktur air bersih dan ranjang rumah sakit memberikan pengaruh yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi.
2.	Agung Budi Luhur Wibowo (2016)	Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016	Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2006 - 2013	PDRB perkapita, Infrastruktur jalan, Infrastruktur listrik, Infrastruktur kesehatan, dan Infrastruktur pendidikan. Data diolah menggunakan analisis data panel.	1. infrastruktur ekonomi dan sosial secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Secara parsial infrastruktur yang memiliki pengaruh positif terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berturut turut adalah infrastruktur listrik, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, sedangkan infrastruktur jalan tidak memiliki

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
					pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di mayoritas pulau kawasan timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di semua pulau kawasan barat Indonesia.
3.	Lise Pranessy, Ridwan Nurazi, Merri Anitasari (2012)	Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu	PDRB, panjang jalan, energi listrik yang terjual, air bersih yang disalurkan, jumlah sekolah dan jumlah puskesmas. Metode Regresi Linier Berganda.	1. Secara simultan diketahui bahwa panjang jalan, energi listrik, air bersih yang disalurkan, jumlah puskesmas dan jumlah sekolah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. 2. Pada pengujian secara parsial, energi listrik, jumlah puskesmas dan jumlah sekolah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Panjang jalan dalam kondisi baik dan air bersih yang disalurkan tidak berpengaruh signifikan karena datanya yang fluktuatif dari tahun ke

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
					tahun.
4.	Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus (2009)	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan	Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Stok modal provinsi, Tenaga kerja provinsi, Human capital, Energi listrik terjual, Panjang jalan, dan Jumlah air bersih yang disalurkan. Analisis ekonometrika berupa data time series, data cross section, atau data panel.	1. Kegiatan perekonomian di Indonesia masih bersifat padat karya sehingga kebijakan-kebijakan yang bersifat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja akan lebih efektif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 2. Infrastruktur baik listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia. Listrik mempunyai peranan paling penting dalam proses produksi.
5.	Deddy Radiansyah (2012)	Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Manajemen Sektor Publik 2012	Analisis Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Periode Tahun 1996 s.d. 2008)	Pendapatan Perkapita, Panjang Jalan, Kapasitas Listrik, Jumlah Sambungan Telfon, Investasi, tingkat pendidikan, dan <i>dummy</i> otonomi daerah. Metode yang dipakai adalah PLS (<i>Pool Least Square</i>)	1. Infrastruktur jalan, listrik, dan telepon, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDRB Perkapita. Apabila terjadi penambahan pada masing-masing infrastruktur jalan, listrik, telepon, maka akan meningkatkan PDRB perkapita dengan asumsi <i>ceteris paribus</i>. 2. Infrastruktur yang memiliki pengaruh terbesar terhadap PDRB perkapita adalah jalan dengan elastis sebesar

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
					0,097, selanjutnya listrik dengan elastis sebesar 0,038, dan terakhir telepon dengan elastis sebesar 0,027.
6.	Evanti Andriani Syahputri (2013)	Skripsi Jurusan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2013	Analisis Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, Panjang Jalan, Jumlah energi listrik yang terjual, dan Jumlah air bersih yang tersalurkan. Metode analisis kuantitatif menggunakan analisis data panel (pooled data).	1. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih di Provinsi Jawa Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada infrastruktur jalan, peningkatan ditandai dengan penambahan jumlah panjang jalan yang tersedia (km). 2. Pada infrastruktur listrik ditandai dengan peningkatan jumlah energi listrik yang terjual (KWh), serta pada infrastruktur air bersih ditandai dengan peningkatan jumlah air bersih yang disalurkan. Infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Infrastruktur listrik memiliki peranan yang paling besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yakni sebesar 0.201601 persen. Sedangkan infrastruktur jalan dan air bersih

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
					masing-masing berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 0.028432 persen dan 0.073085 persen.
7.	Harry Kurniadi Atmaja dan Kasyful Mahalli (2013)	Jurnal Ekonomi	Pengaruh Peningkatan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan, Kondisi Jalan, Kapasitas Air yang Disalurkan, Jumlah Pelanggan Listrik perkapita, Jumlah Pelanggan Telpon perkapita. Etode yang digunakna yakni OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen (jalan, air bersih, listrik, dan telepon) terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh (PDRB) di Kota Sibolga selama periode tahun 1989-2013. 2. Infrastruktur air mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga, Infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga, Infrastruktur listrik memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan di Kota Sibolga, Infrastruktur telepon memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota

No	Peneliti/ Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
					Sibolga.
8.	Abdul Maqin (2011)	Jurnal Trikonomika	Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat	PDRB, Panjag Jalan, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Pendidikan, Konsumsi Listrik, Tenaga kerja, Pengeluaran Pembangunan. Metode dan Teknis analisis regresi dengan data panel (<i>panel data regression model</i>)	1. infrastruktur listrik, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila infrastruktur listrik, jumlah tenaga kerja dan pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat begitu juga sebaliknya. 2. Untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan infrastruktur kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan.

G. Hipotesis

Berdasarkan pemikiran teoritis dan mengacu pada studi empiris yang pernah dilakukan, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin banyak pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas yang tersedia di provinsi Lampung, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung seharusnya akan meningkat. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Hubungan pelanggan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi

Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon perlu dikembangkan. Berbagai infrastruktur ini sangat diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya (Sukirno, 2004: 442). Infrastruktur yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi yang telah di hadapi oleh Indonesia saat ini. Infrastruktur listrik mampu memberikan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kesejahteraan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan itu sendiri, sehingga akan di peroleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, serta di peroleh pertumbuhan ekonomi yang sehat (Hapsari, 2011: 36).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Maqin (2011), konsumsi listrik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA1: Pelanggan listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

2. Hubungan jumlah sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi

Todaro (2006: 434) menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan yang mendasar yakni salah satunya ada pada infrastruktur

pendidikan. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, dan pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Budi Luhur Wibowo (2016), hasilnya secara parsial pendidikan (jumlah sekolah) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA2: Jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

3. Hubungan jumlah puskesmas terhadap pertumbuhan ekonomi

Pembangunan prasarana kesehatan mempunyai posisi penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif, sebab dengan prasarana kesehatan yang memadai niscaya kesehatan para penyelenggaran negara/pemerintah dan masyarakat akan lebih terjamin. Maka dari itu sudah selayaknya jika mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Agar tingkat derajat kesehatan masyarakat dan penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif. Bagaimanapun pembangunan prasarana kesehatan sangat urgen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena itu sudah selayaknya jika prasarana kesehatan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat diakses dengan mudah, murah dan bermutu (Herman, Fitriah, 2014: 2286).

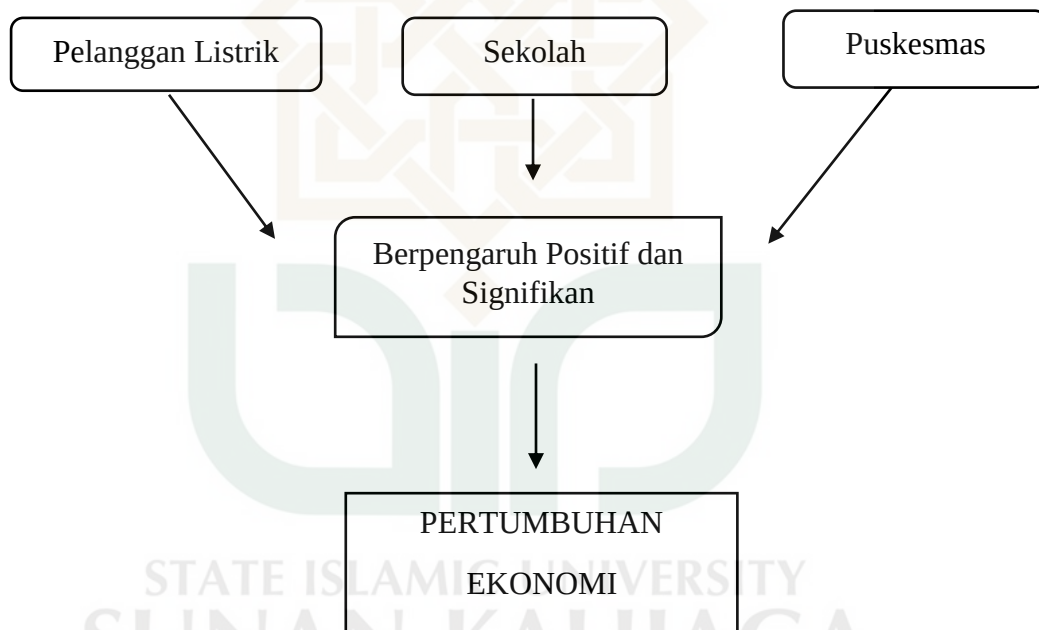
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lise Pranessy, Ridwan Nurazi, dan Merri Anitasari (2012), didapat kesimpulan bahwa infrastruktur kesehatan (jumlah puskesmas) memberikan pengaruh yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA3: Jumlah puskesmas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

H. Kerangka Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, landasan teori, dan telaah pustaka, dimana penulis mengambil 3 variabel bebas tentang pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, dan untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran Operasional

Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan atau secara umum dari penelitian ini. Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas yang ada di Provinsi Lampung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, akan mencari hubungan pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih dan sejauh mana hubungan antar variabel itu berkaitan (Sugiyono, 2003: 11)

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan regresi data panel dengan data *time series* selama 5 tahun dan data *cross section* sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sehingga jumlah observasi sebanyak 70 buah. Alasan mengapa hanya memilih 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari jumlah keseluruhan kabupaten/kota yakni 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, dikarenakan 1 kabupaten yakni kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang diresmikan pada tahun 2013 dari hasil pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat sehingga data yang diperlukan terbatas dan sulit diperoleh.

B. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Jumlah Pelanggan Listrik pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, dan SMK pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan Jumlah Puskesmas pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel independen nya yaitu pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas. Definisi dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, saat ini digunakan harga tahun dasar 2010. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Adapun rumus untuk mencari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan:

$$R_{(t-1, t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen
- PDB_t adalah pendapatan nasional pada tahun t
- PDB_{t-1} adalah pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)

2. Pelanggan Listrik

Variabel pelanggan listrik dapat dilihat dari jumlah pengguna listrik perkapita yang disalurkan oleh pihak PLN pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.

Variabel sekolah dilihat dari banyaknya sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan diukur dengan satuan unit.

4. Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, atau kelurahan. Tim Puskesmas sesuai jadwal dapat melakukan kegiatan Puskesmas Keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Variabel puskesmas dapat dilihat dari banyaknya puskesmas yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan diukur dengan satuan unit.

D. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi data panel atau PLS (*pool least square*). Model regresi data panel digunakan karena memiliki dimensi ruang dan waktu (Gujarati, 2013: 235). Penelitian menggunakan model regresi data panel ini dibantu dengan menggunakan software Ekonometrika Eviews 8 yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian pengujian yang meliputi uji F dan uji T. Pengujian yang kedua adalah pengujian ekonometrik untuk menentukan model estimasi terbaik dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Variabel Bebas dari penelitian ini adalah Pelanggan Listrik (X1), Sekolah (X2), dan Puskesmas (X3).

Secara umum didapat model persamaan nya adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PELIS_{it} + \beta_2 SEK_{it} + \beta_3 PUS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

PE	= Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
PELIS	= Pelanggan Listrik (Pelanggan/kapita)
SEK	= Sekolah (Unit)
PUS	= Puskesmas (Unit)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi

$$\varepsilon_{it} = \text{error term}$$

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan regresi data panel (Gujarati, 2013:237) yaitu:

1. Data panel memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *stady dinamic of adjusment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom = df*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel digunakan untuk mempelajari model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh regresi data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi bahwa tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada model data panel.

Menurut Dedi Rosadi (2012: 271) dalam dataran aplikasi praktis terdapat banyak data (ekonometri) yang merupakan kombinasi dari data bertipe *cross section* dan data *time series* (yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu). Data demikian disebut sebagai data panel atau *pooling*, dan model yang digunakan untuk menganalisis data jenis ini disebut sebagai model data panel.

Menurut Setiawan dan Dwi Endah (2010: 184) secara umum terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu:

a. Asumsi Koefisien Tetap Antarwaktu dan Individu (*Common Effect*)

Pada metode *common effect* ini, menggabungkan seluruh data tanpa mempedulikan waktu dan perusahaan sehingga hanya mempunyai satu data yang terdiri dari tiga variabel, yaitu Y , X_1 , dan X_2 .

b. Asumsi *Slope* Konstan, tetapi Intersepsi Bervariasi (*Fixed Effect*)

1. Antar individu

Pada asumsi ini, variasi terletak pada individu yang faktor waktunya diabaikan sehingga model regresi yang digunakan adalah model regresi dumi.

2. Antar waktu

Pada asumsi ini, variasi terletak pada waktu dan variasi individu diabaikan. Variasi waktu berasal dari dugaan bahwa fungsi investasi dapat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, pajak, efek eksternal, perang, krisis, dan lain sebagainya selama kurun waktu tersebut.

c. Estimasi dengan Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Pendekatan model *fixed effect* dan model dumi untuk data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model. Selain itu, model dumi bisa menghilangkan untuk mengetahui model aslinya. Oleh karena itu, estimasi perlu dilakukan dengan model komponen *error* atau model efek acak.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji *Likelihood Ratio* (Uji Chow)

Likelihood ratio merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Common effect* atau *Fixed effect*. Hipotesis dari uji ini adalah:

$$H_0 = \text{Common effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed effect Model}$$

Jika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect* dan sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih

dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *common effect*.

2. Uji Hausman

Hausman Test merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed effect Model* atau *Random effect Model*. Dimana hipotesis nya yaitu:

$H_0 = \text{Random effect Model (REM)}$

$H_1 = \text{Fixed effect Model (FEM)}$

Tolak H_0 apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari Chi Square atau bisa juga dengan menggunakan nilai probabilitas (p-value), yaitu jika p-value lebih kecil dari tingkat kritis α . Ketika hasilnya adalah tolak H_0 , maka model yang digunakan adalah *Fixed effect Model*.

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier digunakan untuk memilih antara *commont effect* dan *random effect*. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \text{Common effect Model}$

$H_1 : \text{Random effect Model}$

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*), digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu disparitas pendapatan dengan hipotesis

untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq 0$$

Kriteria pengujian:

1. Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

c. Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Kependudukan

Provinsi Lampung merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 300-500 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur, dan $6^{\circ}45'$ sampai $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Lampung memiliki batas-batas yakni di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di bagian Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Luas wilayah Lampung tercatat 34.623,80 km². Akhir tahun 2013, wilayah administrasi Provinsi Lampung terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 2 kota yaitu Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2015 luas masing-masing kabupaten/kota, yaitu Lampung Barat (2.142,78 km²), Tanggamus (3.020,64 km²), Lampung Selatan (700,32 km²), Lampung Timur (5.325,03 km²), Lampung Tengah (3.802,68 km²), Lampung Utara (2.725,87 km²), Way Kanan (3.921,63 km²), Tulang Bawang (3.466,32 km²), Pesawaran (2.243,51 km²), Pringsewu (625,00 km²), Mesuji (2.184,00 km²), Tulang Bawang Barat (1.201,00 km²), Pesisir Barat (2.907,23 km²), Kota Bandar Lampung (296,00 km²), Kota Metro (61,79 km²).

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Kab. Lampung Barat	2 142,78	293 105	137
Kab. Tanggamus	3 020,64	573 904	190
Kab. Lampung Selatan	700,32	972 579	1 389
Kab. Lampung Timur	5 325,03	1 008 797	189
Kab. Lampung Tengah	3 802,68	1 239 096	326
Kab. Lampung Utara	2 725,87	606 092	222
Kab. Way Kanan	3 921,63	432 914	110
Kab. Tulang Bawang	3 466,32	429 515	124
Kab. Pesawaran	2 243,51	426 389	190
Kab. Pringsewu	625,00	386 891	619
Kab. Mesuji	2 184,00	195 682	90
Kab. Tulang Bawang Barat	1 201,00	264 712	220
Kab. Pesisir Barat	2 907,23	149 890	52
Kota Bandar Lampung	296,00	979 287	3 308
Kota Metro	61,79	158 415	2 564
Provinsi	35 288,35	8 117 268	237 56

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2017

Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 8.117.268 jiwa yang terdiri atas 4.162.437 jiwa penduduk laki-laki dan 3.954.831 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 2014, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,13 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2015 mencapai 234 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 3.308 jiwa/ km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen dari tahun 2014.

2. Gambaran Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebagai provinsi yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami perlambatan. Sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi terus melambat hingga mencapai 5,13 persen di tahun 2015. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi melambat dengan tingkat inflasi yang melambat pula. Selama bulan Januari-Desember 2015 tingkat inflasi tercatat sebesar 4,65 persen. Sepanjang tahun 2015 terjadi deflasi di bulan Januari dan Februari. Sementara inflasi tertinggi tercatat pada Desember yakni 1,17 persen (Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2015).

Tabel 4.2
Perkembangan beberapa Indikator Ekonomi Provinsi Lampung, 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13
2	Inflasi (5)	4,24	4,30	7,56	8,36*	4,65*
3	PDRB Seri 2010 ADHB (Milyar Rp.)	170 047	187 349	204 403	230 969	253 163
4	PDRB per Kapita (Rp.)	21 981 474	23 910 843	25 768 941	28 776 867	31 188 146
5	Neraca Perdagangan Luar Negeri a. Ekspor (Juta US \$) b. Impor (Juta US \$)	3 265,83 2 907,12	3 727,66 3 249,88	3 924,48 3 329,52	3 895,78 3 440,46	3 871,41 2 383,72
6	Investasi a. PMDN	7 268	1 007	-	164 487	-

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
	(Juta US \$)	953	414			
	b. PMA (Ribuan US \$)	827 889	-	-	62 179	-
7	Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan pada Bank Persero (%)	6,94	5,91	6,88	8,80	7,87
8	Jumlah Wisatawan Mancanegara	5 537	15 358	14 567	14 476	11 139
9	Produksi Padi (Ribuan Ton)	2 940,80	3 101,46	3 207,00	3 320,06	3 641,90
10	Indeks Nilai Tukar Petani	121,48	125,41	124,53	104,17*	103,17*
11	Penduduk Miskin (%)	16,93	15,65	14,39	14,21	13,52

Keterangan: (-) data tidak tersedia,

(*) tahun dasar 2012=100

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2015

Dilihat dari tabel 4.2, ekspor sebagai salah satu indikator ekonomi di Lampung mengalami penurunan sebesar 0,63 persen di tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan produksi padi Lampung, dimana pada tahun 2015 justru mengalami peningkatan sebesar 9,69 persen dari 3,3 juta ton tahun 2014 menjadi 3,6 juta ton tahun 2015. Nilai tukar petani sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani tercatat 103,17 di tahun 2015, turun sebesar 0,96 persen dari tahun sebelumnya. Demikian pula persentase

penduduk miskin turun menjadi 13,52 persen (Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2015).

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi Lampung yang digambarkan melalui perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dilihat pada tabel 4.3 dimana tahun 2011, dengan nilai PDRB sebesar Rp 160,44 triliun, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 6,56 persen. Di tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan hingga mencapai 5,13 persen di tahun 2015.

Kondisi tahun 2015, semua sektor mengalami pertumbuhan positif, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 11,67 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 17 kategori tercatat 10 kategori yang mengalami percepatan pertumbuhan lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sedangkan 7 sektor lainnya mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta
Rupiah), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54 841 031 (5,38)	56 997 473 (3,93)	59 636 488 (4,63)	61 676 700 (3,42)	63 932 022 (3,66)
B	Pertambangan dan Penggalan	9 757 014 (9,75)	10 303 929 (5,61)	11 485 799 (11,47)	11 592 348 (0,93)	12 079 303 (4,20)
C	Industri Pengolahan	27 146 427	19 677 129	31 973 935	33 414 650	35 912 939

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
		(4,97)	(9,32)	(7,74)	(4,51)	(7,48)
D	Pengadaan Listrik, Gas	140 403 (8,43)	161 678 (15,15)	179 191 (10,83)	196 795 (9,82)	203 873 (3,60)
E	Pengadaan Air	176 578 (5,13)	185 094 (4,82)	182 184 (-1,57)	195 830 (7,49)	200 670 (2,47)
F	Konstruksi	14 336 717 (5,74)	15 259 753 (6,44)	15 806 448 (3,58)	17 023 886 (7,70)	17 413 158 (2,29)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19 776 845 (7,54)	20 813 161 (5,24)	21 431 655 (2,97)	22 713 950 (5,98)	23 163 981 (1,98)
H	Transportasi dan Pergudangan	6 867 518 (8,20)	7 578 030 (10,35)	8 135 379 (7,35)	8 757 695 (7,65)	9 779 649 (11,67)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 936 230 (8,64)	2 119 584 (9,46)	2 242 990 (5,82)	2 416 469 (7,73)	2 632 962 (8,96)
J	Informasi dan Komunikasi	5 620 479 (12,34)	6 372 264 (13,38)	6 969 232 (9,37)	7 584 986 (8,84)	8 406 949 (10,84)
K	Jasa Keuangan	3 304 942 (14,37)	3 691 723 (11,70)	3 940 431 (6,74)	4 000 882 (1,53)	4 143 424 (3,56)
L	Rael Estate	4 451 859 (7,02)	4 820 946 (8,29)	5 301 396 (9,97)	5 709 667 (7,70)	5 966 147 (4,49)
M,N	Jasa Perusahaan	191 611 (15,73)	218 240 (13,90)	244 412 (11,99)	264 092 (8,05)	285 142 (7,97)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 968 668 (1,17)	5 274 721 (6,16)	5 406 076 (2,49)	5 850 912 (8,23)	6 423 699 (9,79)
P	Jasa Pendidikan	4 116 944 (13,68)	4 302 017 (4,50)	4 526 263 (5,21)	5 027 312 (11,07)	5 361 599 (6,65)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 414 398 (7,38)	1 578 688 (11,62)	1 694 907 (7,36)	1 781 589 (5,11)	1 902 988 (6,81)
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1 389 838 (4,63)	1 414 777 (1,79)	1 463 224 (3,42)	1 582 235 (8,13)	1 716 916 (8,51)
PDRB		160 437 501	170 769 207	180 620 008	189 789 999	199 525 420
		(6,56)	(6,44)	(5,77)	(5,08)	(5,13)

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2015

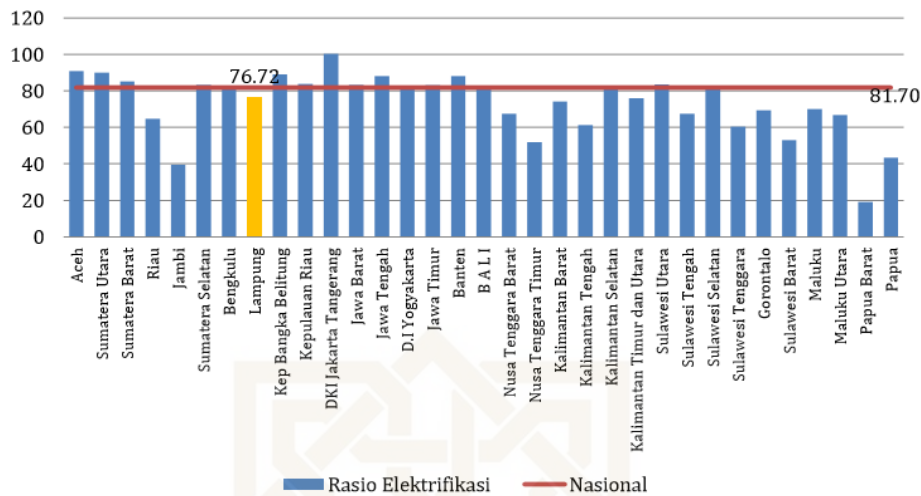
3. Gambaran Listrik, Sekolah, dan Puskesmas

a. Listrik

Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil (Seri Analisis Pembangunan Wilayah, 2015).

Dalam publikasi Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung (2015), Lampung memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan belum dimanfaatkan, antara lain luasnya wilayah pegunungan dengan potensi hutan yang mengandung sumber energi air dan biomasa energi biogas dari produk pertanian dan peternakan. Potensi panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut mencapai 300 MW. Potensi air untuk pembangkit tenaga listrik juga sangat besar, Pada SWS Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan melalui PLTA Besai dan PLTA Batu Tegi. Pada SWS Way Semangka Lower dan Way Semung masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW dan 2,6 MW.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung tahun 2014 masih di bawah 100 persen yaitu 76,72 lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen (Gambar 4.1). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Produksi listrik wilayah Lampung baik diproduksi sendiri maupun diterima dari unit lain tahun 2014 sebesar 4.058 GWh, mengalami peningkatan sebesar 9,38 persen dari tahun 2013. Produksi listrik tersebut disalurkan kepada 1,5 juta pelanggan sebanyak 3.392,43 GWh. Pengguna listrik terbesar dalam hal ini adalah rumah tangga, bisnis, sosial serta pelanggan lainnya.



Gambar 4.1
Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014

Catatan: Tidak termasuk pelanggan PLN

Sumber: Statistik PLN, 2014

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kebutuhan listrik Provinsi Lampung sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN (Persero), seiring dengan bertambahnya kebutuhan pemenuhan listrik, pada tahun 2015 adalah sebesar 2.208.138 Mw, sementara listrik yang terjual sebesar 266.028.405 Mw. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2015 pelanggan listrik mencapai 1.732.529 pelanggan.

b. Sekolah

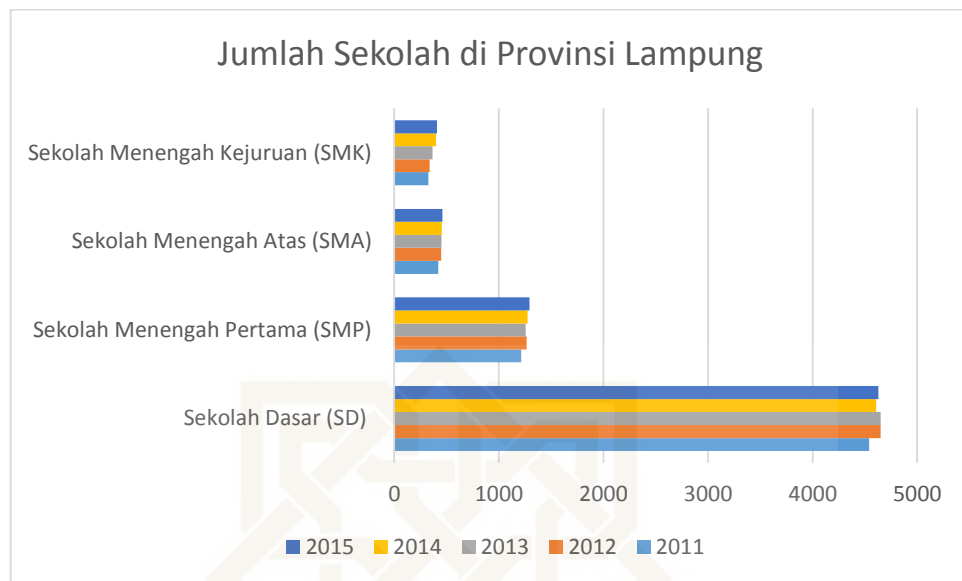
Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, Infrastruktur pendidikan atau yang lebih

dikenal dengan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pendidikan bagi siswa-siswi.

Infrastruktur sekolah yang dapat dilihat dari jumlah sekolah yang terdapat di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015 (lihat gambar 4.2) dimulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan tingkat SMA/SMK. Pada tahun 2011 jumlah Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Provinsi Lampung terdapat 4539 unit, tahun 2012 dan 2013 terdapat 4649 unit, sedang pada tahun 2014 terdapat 4606 unit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 terdapat 4629 unit Sekolah Dasar.

Di tingkat Sekolah Menengah Pertama, pada tahun 2011 sebanyak 1215 unit sekolah SMP, tahun 2012 bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 51 unit yakni dengan jumlah 1266 unit, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 11 unit sekolah yakni dengan jumlah sekolah 1255 unit, pada tahun 2014 terdapat 1274 unit jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya, sedang pada tahun 2015 adalah sebanyak 1292 unit sekolah SMP, dimana tahun 2015 adalah tahun dengan jumlah sekolah SMP terbesar dibanding 4 tahun sebelumnya.

Jumlah sekolah pada jenjang SMA yang terdapat di Provinsi Lampung tahun 2011 adalah sebanyak 421 unit sekolah, tahun 2012 sebanyak 447 unit sekolah, tahun 2013 sebanyak 453 unit sekolah, tahun 2014 sebanyak 456 unit sekolah, sedang pada tahun 2015 sebanyak 462 unit sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan jumlah sekolah SMA di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kemudian, jumlah sekolah pada jenjang SMK di Provinsi Lampung pada tahun 2011 sebanyak 326 unit, tahun 2012 sebanyak 338 unit, tahun 2013 sebanyak 366 unit, tahun 2014 sebanyak 400 unit, sedang tahun 2015 sebanyak 410 unit. Dengan demikian jumlah sekolah SMK tahun 2011-2015 di Provinsi Lampung mengalami penambahan dari tahun ke tahun.



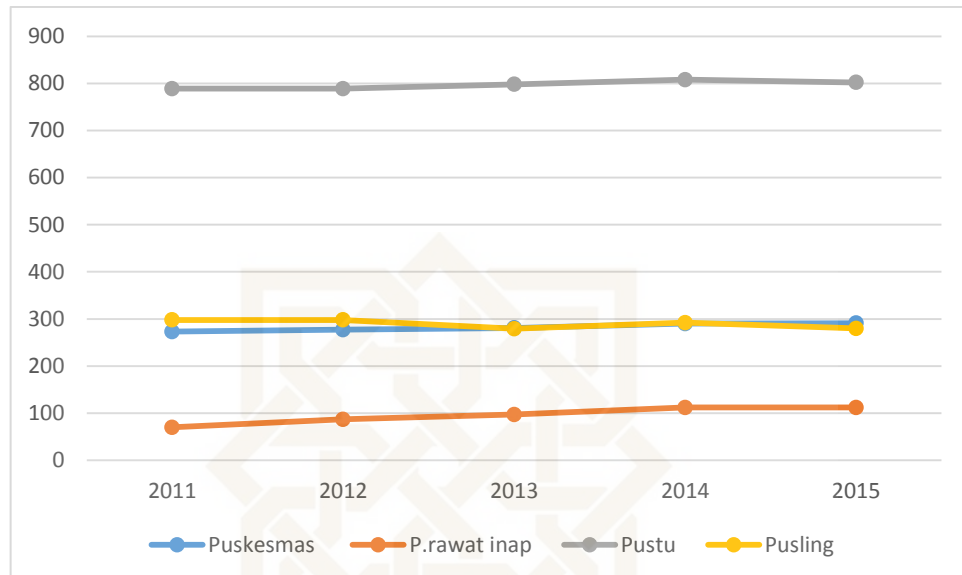
Gambar 4.2
Jumlah Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015
Sumber: Simreg Bappenas, data diolah

c. Puskesmas

Dalam profil kesehatan Provinsi Lampung (2015), Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan/akses pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana kesehatan merupakan hal yang penting. Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting, karena terlibat langsung dengan masyarakat.

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat di Indonesia, sesuai dengan definisinya, yakni unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut didukung oleh sarana puskesmas pembantu

dan puskesmas keliling serta jaringannya baik bidan di desa, posyandu dan poskesdes.



Gambar 4.3

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskemas Keliling di Provinsi Lampung tahun 2011-2015

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas tahun 2011 sebesar 273 unit, tahun 2012 sebanyak 277 unit, tahun 2013 sebanyak 281 unit, tahun 2014 sebanyak 290 unit, dan tahun 2015 sebanyak 291 unit. Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah puskesmas cenderung meningkat setiap tahunnya, termasuk juga dengan jumlah Puskesmas Rawat Inap demikian pula untuk jumlah Pustu (Puskemas Pembantu) tampak meningkat sampai tahun 2015.

B. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik di 14 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya menggunakan variabel Pelanggan Listrik, Sekolah, dan Puskesmas. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni tahun 2011-2015 di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan keseluruhan total

observasi yang digunakan adalah sebanyak 70. Berikut adalah data statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan aplikasi Eviews 8.

Tabel 4.4
Data Statistik Deskriptif

	PE	Pelanggan Listrik	Sekolah	Puskesmas
Mean	5,7	1070459,4	446,2	19.87
Median	5,7	81851	410	19
Maximum	6,9	252340	814	38
Minimum	2,8	21120	110	9
Std. Dev.	0,6	66990,27	207,2	8.82
Observations	70	70	70	70

Sumber: Lampiran 2

Dari tabel 4.4 dapat dilihat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung adalah senilai 5,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung yakni pada tahun 2014 dengan nilai 6,91 persen, sedangkan laju pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Lampung Timur dengan 2,87 persen pada tahun 2014.

Untuk pelanggan listrik yang ada pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015, Rata-rata dari banyaknya pelanggan listrik adalah sebanyak 1070459,4 pelanggan, jumlah tertinggi pelanggan listrik berada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 sebanyak 252.340 pelanggan, sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Mesuji tahun 2011 dengan jumlah 21.120 pelanggan.

Selanjutnya rata-rata dari banyaknya jumlah sekolah yakni 446,2 unit. Jumlah sekolah yang paling sedikit berada pada Kota Metro tahun 2011 dengan jumlah 110 unit sekolah, sedangkan untuk jumlah sekolah terbanyak berada pada Kabupaten Lampung Timur tahun 2014 dan 2015 yakni sebanyak 814 unit.

Kemudian untuk rata-rata jumlah puskesmas adalah sebanyak 19,87 unit. Nilai tertinggi terdapat di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 dan 2015 yakni sebanyak 38 unit puskesmas, sedangkan untuk nilai terendah yakni

sebanyak 9 unit terdapat pada kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2013, dan kabupaten Mesuji tahun 2011-2013.

C. Hasil Analisis Regresi

1. Uji Spesifikasi Model

a. Hasil Uji *Likelihood*

Uji *Likelihood* merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Common effect* atau *Fixed effect*. Hipotesis dari uji ini adalah:

$H_0 = \text{Common effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed effect Model}$

Berdasarkan hasil estimasi *Common effect* dan *Fixed effect* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji *Likelihood*

Chi-Square	Statistic	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	7.607383	(4,62)	0.0000
Kesimpulan :	Prob. < 0.05		
	Ho ditolak		
	Model Fixed Effect lebih baik dari Model Common Effect		
$\alpha=0.05$			

Sumber: Lampiran 3

Dari hasil regresi di atas, Perhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect* dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Hausman

Hausman Test merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed effect Model* atau *Random effect Model*. Dimana hipotesis nya yaitu:

H_0 = *Random effect Model* (REM)

H_1 = *Fixed effect Model* (FEM)

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed effect Model* dan *Random effect* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman

Chi-Square	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f	Prob.
<i>Cross-section random</i>	29.670721	3	0.0000
Kesimpulan :	Prob. > 0.05		
	Ho diterima		
	Model Random Effect lebih baik dari Model Fixed Effect		
$\alpha=0.05$			

Sumber: Lampiran 4

Dari hasil regresi di atas, Perhatikan nilai probabilitas (Prob.) *Cross-section random*, terlihat bahwa nilai Prob. *Cross-section random* sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Random Effect*. Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini model *Fixed Effect* lebih baik daripada model *Random Effect* dan *Common Effect*, tanpa harus dilakukan uji selanjutnya yaitu uji *Langrage Multiplier* (LM Test).

2. Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni terdiri dari infrastruktur listrik, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah hasil estimasi dari model terpilih yakni *Fixed Effect*:

Tabel 4.7
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

	Coefficient	Probability	Kesimpulan
C	6.18	0.0000	Signifikan
Pelanggan listrik	6.24	0.0100	Signifikan
Sekolah	-0.002	0.0001	Signifikan
Puskesmas	0.009	0.6271	Tidak Signifikan
R-Squared	0.447536		
F-statistic	7.174935		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil uji *likelihood* dan uji *hausman* pada tabel 4.5 dan tabel 4.6, didapat model *fixed effect* yang paling baik sebagai model estimasi untuk mengetahui pengaruh pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Adapun model pesamaannya yakni sebagai berikut:

$$PE_{it} = 6.18 + 6.24 \text{ PELIS}_{it} - 0.002 \text{ SEK}_{it} + 0.009 \text{ PUS}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari hasil persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

1. Apabila jumlah pelanggan listrik, sekolah, dan puskesmas bernilai 0 maka pertumbuhan ekonomi akan bernilai sama dengan koefisien c yakni sebesar 6,18 persen.
2. Koefisien nilai dari pelanggan listrik diperoleh sebesar 6,24 dengan probabilitas 0,0100. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung tahun 2011-2015. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila jumlah pengguna/pelanggan listrik naik 1 pelanggan maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 6,24 persen.

3. Koefisien dari sekolah diperoleh sebesar -0,002 dengan probabilitas yang didapat adalah sebesar 0,0001. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila jumlah sekolah naik 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar nilai koefisien yakni 0,002 persen.
4. Koefisien dari puskesmas memiliki nilai sebesar 0,009 dengan probabilitas sebesar 0,6271. Hasil ini menunjukkan bahwa puskesmas mempunyai slope positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya jumlah puskesmas tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X).

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R-Square	Adjusted R-Square
1	0.44	0.38

Model 1 : (a) variabel dependen = Pertumbuhan Ekonomi; (b) variabel independen = Pelanggan Listrik, Sekolah, dan Puskesmas.

Sumber: Lampiran 5

Dari hasil diatas, didapat nilai R square adalah 0.44, hal ini berarti 44% variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yakni Pelanggan Listrik, Sekolah, dan Puskesmas. Sedangkan sisanya ($100\% - 44\% = 56\%$) dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model regresi.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu disparitas pendapatan dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas.

Tabel 4.9
Hasil Uji F

Sum of Square	df	Mean Square	F-Stat	Prob.
17.89	3	5.77	7.174935	0.000003

Sumber: Lampiran 5

Dari hasil pengujian simultan diatas, didapat nilai F hitung sebesar 7.174935 dengan probabilitas 0.000003. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yakni 5% atau 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pertumbuhan Ekonomi atau dapat dikatakan bahwa Pelanggan Listrik, Sekolah, dan Puskesmas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh dan signifikan apabila nilai probabilitas yang didapat lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan yakni 5% atau 0,05 persen. Berdasarkan hasil pengujian diatas (lihat tabel 4.8), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel pelanggan listrik adalah sebesar 6,24 dengan probabilitas 0,0100. Itu berarti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dengan taraf signifikansi yang digunakan yakni 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sesuai dengan hipotesis penulis.
2. Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien dari variabel sekolah adalah sebesar -0,002 dengan probabilitas 0,0001. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi yakni 0,05 maka probabilitas nya lebih kecil dari taraf signifikansi tersebut. Hal ini berarti bahwa sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi berslope negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.
3. Dari hasil regresi dapat diketahui nilai koefisien dari variabel puskesmas sebesar 0,009 dengan probabilitas 0,6271. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi yang digunakan yakni 0,05 maka probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi. Hal ini berarti bahwa puskesmas tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puskesmas tidak signifikan dan tidak sesuai dengan hipotesis penulis, maka hipotesis ditolak.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pelanggan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis pertama (HA_1) yang diajukan oleh penyusun pada penelitian ini adalah pelanggan listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hasil dari regresi penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya kurang dari taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,0000. Nilai dari koefisien adalah sebesar 6,24 yang artinya bahwa setiap ada kenaikan pada infrastruktur listrik sebanyak 1

pelanggan maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik sejumlah 6,24 persen pertahun pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Oleh karena itu, maka Hipotesis pertama (HA_1) diterima.

Meskipun sering terjadi pemadaman listrik di Provinsi Lampung yang hampir sehari-hari, tetapi listrik sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena listrik sudah menjadi bahan utama bagi masyarakat untuk memulai aktivitas dan produktivitas kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Firdaus (2009) dimana infrastruktur listrik mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian. Listrik mempunyai peranan paling penting dalam proses produksi. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dalam menghadapi krisis global sangatlah tepat dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Hal ini juga diperkuat oleh Wahidi D (2015: 226) yang menyebutkan bahwa energi listrik telah lama dimanfaatkan secara nasional untuk berbagai keperluan. Ketergantungan masyarakat terhadap listrik juga semakin tinggi. Mengenai kebutuhan dan pasokan listrik, menurut Direktur Jendral Ketenagalistrikan, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa determinan kebutuhan listrik berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pasokan listrik secara merata. Untuk mencapai target pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik rata-rata 8,4 persen per tahun dalam periode 2013-2022 dan dengan mempertimbangkan kapasitas pembangkit yang dimiliki saat ini, maka dibutuhkan penambahan kapasitas pembangkit rata-rata 5.700 Mw per tahun, di samping program listrik pedesaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Desty Nurhidayanti (2014) yang menyebutkan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hipotesis kedua (HA_2) yang di diajukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hasil penelitian didapat bahwa sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya kurang dari taraf signifikansi 0,05 yakni sebesar 0,0001. Nilai dari koefisien regresi nya adalah sebesar -0,002. Artinya setiap terjadi kenaikan pada jumlah sekolah sebesar 1 unit maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,002 persen pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Oleh karena itu, maka HA_2 ditolak.

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya.

Tabel 4.10
Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas per Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015

JENJANG	RUANG KELAS								
	Jumlah	Kondisi							
		Baik	%	R.R	%	R.S	%	R.B	%
SD	43.602	7.452	17,09	31.119	71,37	3.003	6,89	2.028	4,65
SMP	13.730	2.730	19,88	9.642	70,23	831	6,05	527	3,84
SMA	4.735	1.930	40,19	2.387	50,41	339	7,16	106	2,24
SMK	3.809	1.486	39,01	2.100	55,13	155	4,07	68	1,79
JUMLAH	65.876	13.571	20,60	45.248	68,69	4.328	6,57	2.729	4,14

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2015-2019

Data di atas menunjukkan bahwa hanya 20,60% ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Lampung yang berada dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi rusak, meski didominasi oleh rusak ringan. Jadi, rehabilitasi ruang kelas juga masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, kondisi ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, dan kondisi fisik bangunan sekolah lainnya juga merupakan bagian dari permasalahan yang harus mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung.

Selain itu, rendahnya daya saing pendidikan antar wilayah kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan pendidikan ke depan. Keberadaan sekolah unggulan di Lampung masih didominasi oleh daerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Metro, atau belum menyebar di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka kecenderungan penumpukan siswa di daerah perkotaan akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya disparitas APK antarwilayah kabupaten/kota.

Penelitian dengan hasil yang sama di lakukan oleh Desty Nurhidayaanti Chaerunnisa (2014) yang menyebutkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kondisi sekolah dengan keadaan rusak meningkat hingga tahun 2012 mencapai 30 sekolah yang rusak dan didominasi oleh gedung sekolah dasar. Meskipun jumlah sekolah dengan kondisi baik meningkat juga, namun keberadaan sekolah dengan kondisi rusak akan menghambat proses pendidikan disebagian wilayah serta menurunkan kualitas sekolah di Kota Sukabumi. Selain itu, jumlah pengajar yang belum memadai disertai dengan kualitas pengajar yang belum baik pula serta kurangnya kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya yang menyebabkan sekolah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi.

Sedangkan penelitian yang hasilnya berbeda di lakukan oleh Pranessy, dkk (2012) yang menyebutkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana penelitian ini didukung oleh

Teori human capital yang merupakan aktualisasi dari teori motivasi Abraham Maslow dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

3. Pengaruh Puskesmas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hipotesis ketiga (HA₃) yang diajukan oleh penyusun pada penelitian ini adalah puskesmas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini adalah puskesmas tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yakni sebesar 0,6271 dengan nilai koefisien yakni sebesar 0,009. Artinya variabel puskesmas tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015. Oleh karena itu, maka HA₃ ditolak.

Dilihat dari Rasio Puskemas dan Pustu selama tahun 2012-2015 tampak berfluktuatif naik turun perbandingannya dan belum mencapai target yang telah ditentukan (lihat tabel 4.11). Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja Puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 20.000 penduduk, rasio puskesmas per 100.000 penduduk tahun 2015 adalah sebesar 4 unit, namun angka ini belum memenuhi standar (5 puskesmas dalam 100.000 penduduk), rasio tahun 2015 rata-rata satu Puskesmas melayani 27.894 penduduk. Sedangkan untuk jumlah Puskesmas Pembantu selama 3 tahun terhitung dari tahun 2013-2015, cenderung berfluktuatif (naik turun) pada tahun 2015 sebanyak 808 unit dengan rasio sekitar 1 : 10.046 penduduk. Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk tahun 2015 sebesar 10 per 100.000 penduduk namun angka ini belum mencapai standar dimana setiap 100.000 penduduk seharusnya memiliki 17 Puskesmas Pembantu (Dinas Kesehatan, 2015).

Tabel 4.11
Rasio Puskesmas dan Pustu Terhadap Penduduk di Provinsi Lampung
tahun 2013-2015

No	Rasio	Target	Pencapaian		
			2013	2014	2015
1	Ratio Puskesmas terhadap penduduk	1 : 20 000	1 : 28 439	1 : 27 677	1 : 27 894
2	Ratio Pustu terhadap penduduk	1 : 6 000	1 : 9 940	1 : 9 933	1 : 10 046

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015

Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Warsilan dan Ahmad Noor (2015) menyebutkan bahwa puskesmas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis bahwa puskesmas berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin lengkap dan baik keberadaan puskesmas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil penelitian yang sama ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Maqin (2011) yang menyebutkan bahwa infrastruktur kesehatan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan infrastruktur kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi yang berlawanan arah diduga karena perbaikan infrastruktur kesehatan menyebabkan biaya pengobatan dan rawat inap semakin mahal. Bila melihat bukti empiris tersebut, berarti pengeluaran pemerintah selama ini hanya terserap untuk meningkatkan sarana kesehatan, bukan ditujukan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan/akses pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana kesehatan merupakan hal yang penting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN-N) 2005-2025 disebutkan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kesehatan bersama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat merupakan tiga pilar untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Dalam RPJP-N dinyatakan

bahwa pembangunan nasional di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi semua orang agar mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Derajat kesehatan disuatu Negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasana kesehatan.

